

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di *Geophysical Research Letters* edisi April 2022, Jakarta dan Semarang masuk ke dalam daftar kota paling cepat tenggelam di dunia, Jakarta menempati posisi ketiga setelah Tianjin, sementara China dan Semarang berada dalam urutan kota-kota yang paling cepat tenggelam. Berdasarkan penelitian tersebut, tanah di Semarang berada di urutan kedua dengan rata-rata penurunan sebesar 3,96 cm per tahun, Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, telah menghadapi masalah banjir dan rob selama bertahun-tahun. Lokasinya berada Di muara Sungai Semarang, karakteristik tanahnya berupa lapisan aluvium yang terbentuk dari proses sedimentasi akibat banjir (katadata.co.id, 2023)

Pembangunan di wilayah pesisir, seperti pembangunan mal, apartemen, dan hotel, serta eksploitasi air tanah yang berlebihan, telah menyebabkan penurunan permukaan tanah di wilayah utara Kota Semarang. Hal ini memperparah masalah genangan yang dikenal sebagai rob. Rob adalah banjir akibat pasang surut air laut, hal ini terjadi ketika permukaan tanah berada di bawah level permukaan air laut saat terjadi pasang. Hal ini merupakan masalah yang terus-menerus di kawasan tersebut dan memerlukan intervensi manusia untuk mengatasi dampaknya. (Indahsari, 2023)

Berdasarkan data rekapitulasi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencatat adanya kejadian rob di wilayah

Kota Semarang terus meningkat. Pada tahun 2021 BPBD Kota Semarang mencatat terdapat 2 kejadian rob di Kota Semarang. Pada tahun 2022, kejadian rob mengalami peningkatan dengan total 7 kejadian, salah satunya adalah peristiwa rob terbesar yang terjadi pada 23 Mei 2022. Peristiwa ini disebabkan oleh jebolnya tanggul laut di area industri Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, yang menyebabkan banjir rob di wilayah Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas. Banjir ini diduga terjadi akibat tanggul yang rusak, mengakibatkan air merendam kawasan industri dan permukiman. Ketinggian air di dalam rumah warga mencapai 50 sentimeter, sementara di jalan mencapai 1 meter. Ribuan pekerja dari berbagai pabrik di kawasan industri tersebut terpaksa menyelamatkan diri. Selain kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, ribuan mesin jahit serta mesin produksi juga terkena dampak. Puluhan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas ikut terendam air, diperparah oleh gelombang tinggi dan jebolnya tanggul laut (cnnindonesia.com, 2022). Banjir rob ekstrem yang melanda pelabuhan Tanjung Emas Semarang menyebabkan kerugian besar dengan nilai kerugian mencapai Rp 615 miliar (detik.com, 2022). Sedangkan, pada tahun 2023, BPBD Kota Semarang belum memiliki data lengkap terkait jumlah kejadian rob di Kota Semarang. Namun, rob terjadi pada Kamis, 1 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Dampak rob tersebut dirasakan di wilayah RW 14 dengan ketinggian air sekitar 10-20 cm, serta di wilayah RW 15 dengan ketinggian air sekitar 5-10 cm (bpbd.jatengprov.go.id, 2023).

Selain itu, pada tahun 2023 banjir rob juga merendam Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Semarang-Demak, Jawa Tengah, pada Minggu, 14 Mei 2023.

Banjir dengan kedalaman hingga 30 sentimeter ini menggenangi kedua arah jalan, baik menuju Kota Semarang maupun Kabupaten Demak. Dampaknya, kemacetan panjang terjadi di kedua arah. Dari arah Demak, kemacetan terjadi hingga daerah Onggorawe sepanjang 3 kilometer, sementara dari arah Kota Semarang, kemacetan mencapai 5,5 kilometer dari Terminal Terboyo. Lalu lintas tersendat karena pengendara memperlambat laju kendaraan saat melintasi genangan rob (nasional.tempo.co, 2023).

Rob juga merendam kampung di pesisir Semarang pada tanggal 24 Mei 2023. Air rob mulai pasang dan merendam permukiman di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, dengan ketinggian mencapai 50 cm. Kondisi ini mengganggu aktivitas ratusan keluarga di Kampung Tambakrejo, di mana air rob juga masuk ke dalam rumah warga. Masyarakat merasa kelelahan karena harus rutin membersihkan rumah setiap kali air surut, meskipun rob kembali datang keesokan harinya. Warga tidak dapat berbuat banyak ketika rob terjadi. Sebelumnya, warga telah bergotong royong meninggikan jalan di kampung tersebut, dan dulunya ada pompa untuk menyedot air rob, namun saat ini pompa tersebut sudah tidak tersedia (nasional.tempo.co, 2023). Berdasarkan masalah rob yang terus terjadi hingga tahun 2023 maka penanganan rob di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan permasalahan banjir rob di Kota Semarang, rob banyak terjadi di Wilayah Semarang Utara. Kawasan ini, termasuk Kelurahan Bandarharjo, Tanjungmas, dan sekitarnya, sering mengalami genangan air yang parah akibat banjir rob. Permasalahan ini diperparah oleh pembangunan wilayah pesisir yang

tidak terkontrol dan pengambilan air tanah yang berlebihan, menyebabkan penurunan tanah yang signifikan. Insiden besar seperti jebolnya tanggul laut di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2022, serta banjir rob yang merendam kawasan industri dan permukiman hingga mencapai ketinggian 1 meter, menunjukkan dampak serius dari masalah ini. Meski upaya penanggulangan telah dilakukan, seperti peninggian jalan dan penggunaan pompa air, kondisi rob yang terus berulang mengindikasikan bahwa penanganan yang ada belum optimal, menyebabkan gangguan signifikan bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat.

Rob dan banjir menjadi masalah signifikan bagi penduduk serta pengguna transportasi di Kota Semarang. Masyarakat merasa tidak nyaman saat berkendara karena adanya risiko kendaraan menjadi rusak atau keropos akibat genangan air, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk pindah dari wilayah terdampak rob tersebut. Selain itu, dampak sosialnya termasuk hambatan dalam transportasi dan gangguan pada aktivitas ekonomi, serta potensi penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi kota Semarang jika harus melewati daerah-daerah yang terkena dampak rob dan banjir.

Menurut Hakam (2018), upaya penanganan banjir dan rob di Semarang sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), serta tanggul-tanggul di sepanjang pesisir pantai merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya rob. Namun, nampaknya pembangunan tersebut belum dapat mengurangi masalah banjir dan rob. Hal ini dikarenakan upaya

mencegah terulangnya rob hanya dilakukan pada pembangunan pengendalian rob saja. Sudah saatnya Semarang Utara dan area pelabuhan ditata ulang dengan menerapkan prinsip inklusif dan tangguh (*resilient*), untuk mencegah dampak buruk seperti penurunan tanah dan banjir. Kebijakan yang melarang pembangunan baru serta mengurangi kerusakan lebih lanjut, seperti amblesnya tanah, banjir, dan ekstraksi air tanah, harus diberlakukan secara tegas dengan sanksi yang berat. Pabrik dan kawasan industri di pesisir Semarang juga berkontribusi terhadap eksploitasi air tanah melalui pengeboran untuk keperluan industri, mengingat sebagian besar kawasan industri berada di wilayah pesisir Semarang Utara (Saputri dan Linda, 2023).

Reklamasi pantai di kawasan Pantai Marina Semarang dianggap sebagai salah satu penyebab rob. Aktivitas reklamasi ini menyebabkan penurunan tanah (*land subsidence*), yang mengakibatkan lahan hasil reklamasi sering kali tergenang rob (Sembiring, 2019). Sebagai respons, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menangani masalah rob dengan mencantumkan pengendalian rob dan banjir melalui kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, pada Pasal 33 huruf c menjelaskan menunjukkan upaya pemerintah dalam merencanakan sistem jaringan sumber daya air, salah satunya untuk sistem pengendalian rob dan banjir. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) juga menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari Pasal 33 huruf c bahwa:

Pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Daerah;
- b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;
- c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
- d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
- e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.

Kebijakan di atas menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan rob dan banjir di Semarang. Pengendalian ini dilakukan melalui beberapa strategi, seperti pengembangan kolam tampung air untuk menampung kelebihan air hujan, pembangunan tanggul di wilayah pesisir yang sering terkena banjir rob (Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk), serta normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mencegah luapan. Selain itu, pengendalian pembangunan di wilayah hulu seperti Kecamatan Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, dan peningkatan kualitas drainase di seluruh kota bertujuan mengoptimalkan pembuangan air sehingga mengurangi genangan saat hujan lebat. Pendekatan ini menggabungkan solusi struktural dan perencanaan tata ruang untuk menghadapi masalah rob dan banjir secara berkelanjutan.

Namun nyatanya kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik karena masalah rob di Kota Semarang khususnya wilayah Semarang Utara masih terus terjadi setiap tahunnya. Sehingga diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan efektivitas dari kebijakan tersebut. Meskipun berbagai upaya seperti peninggian jalan dan pemasangan pompa air telah dilakukan, frekuensi dan dampak rob yang masih tinggi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum cukup efektif. Evaluasi ini

penting untuk memahami kebijakan yang ada sudahkah sesuai dengan kebutuhan lapangan dan implementasinya dilakukan dengan benar atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisa evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.
- b. Menganalisa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengembangan wawasan mengenai evaluasi kebijakan penanganan rob di

Semarang Utara dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

b. Manfaat Praktis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat terkait evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari kajian dari peneliti terdahulu, sehingga dapat diketahui arah dan research on dan kajian oleh peneliti terdahulu yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1	Ria Erlani (2019) Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob)	Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deduktif kuantitatif-kualitatif.	Upaya -upaya yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani banjir rob serta penilaian terhadap tingkat kesiapsiagaan Kota Semarang dalam menghadapi bencana banjir rob tersebut.	Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Semarang, termasuk Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat ketangguhan Kota Semarang dalam menghadapi banjir rob berada pada kategori 'sedang'. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang belum sepenuhnya siap dalam menangani potensi bencana banjir rob secara optimal.
2	Riska Maulita (2023) Mitigasi Bencana Banjir	Metode kualitatif	Cara masyarakat Mangkang Wetan dan pemerintah strukturalnya	Pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan upaya mitigasi banjir rob, baik dari segi struktural maupun

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
	Rob di Mangkang Wetan: Tindakan Sosial Masyarakat dan Kapabilitas Struktural		merespons ancaman banjir rob, sehingga dapat diukur sejauh mana kesiapan mereka dalam menghadapi bencana tersebut.	non-struktural, akibat adanya pertimbangan tertentu dalam pelaksanaan tindakan. Akibatnya, masyarakat merasa pasrah terhadap situasi tersebut, sehingga upaya mitigasi bencana belum dilaksanakan secara optimal
3	Atha Difa Saputri dan Angel Maris Linda (2023) Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Dinamika Subsidi Tanah di Tambakrejo Semarang	Metode kualitatif	Seberapa banyak langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani masalah subsidi tanah di Tambakrejo, Semarang	masyarakat Tambakrejo merasakan dampak kerugian akibat subsidi baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, efektivitasnya masih kurang dirasakan oleh masyarakat Tambakrejo.
4	Marlitha Nusa Prashayu (2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Banjir Rob di Kota Semarang (Studi Kasus : Kelurahan Panggung Lor Kota Semarang)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif Kualitatif	Peran serta masyarakat dalam penanganan banjir rob serta faktor-faktor yang menghambat masyarakat Panggung Lor dalam mengatasi masalah banjir rob.	partisipasi masyarakat di Kelurahan Panggung Lor telah efektif dalam mengatasi masalah banjir rob di daerah tersebut. Partisipasi ini mencakup kontribusi dalam bentuk uang, barang, tenaga, waktu, dan ide-ide.
5	Haris Dian Nugraha (2021) Implementasi Penanggulangan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Pelaksanaan, faktor-faktor pendukung, serta kendala dalam implementasi program Penanggulangan	Pelaksanaan program Penanggulangan Banjir Rob melalui pengelolaan drainase di Kecamatan Pontianak Selatan oleh Dinas Pekerjaan

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
	Banjir Rob Melalui Program Penyelenggaraan Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	dengan pendekatan deskriptif induktif.	Banjir Rob melalui pengelolaan drainase di Kecamatan Pontianak Selatan, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.	Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya banjir rob yang mengakibatkan genangan air di jalanan.
6	Rizky Pandapotan Sembiring (2019) Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Semarang Tahun 2011-2031	Penelitian kualitatif	Pelaksanaan strategi untuk mencegah dan mengatasi banjir serta rob di Kota Semarang, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut.	Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan banjir serta rob sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan Sistem Polde, normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat serta Timur, pembangunan Bendungan Jatibarang, pengembangan sistem drainase, serta operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir.
7	Agni Musa Hakam (2018) Evaluasi Proses Kebijakan Penanganan Banjir	Penelitian deskriptif kualitatif	Dalam proses kebijakan penanganan banjir rob di Kota Semarang yang	Evaluasi terhadap proses kebijakan penanganan banjir rob di Kota Semarang mengungkapkan beberapa

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
	Rob di Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang		dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, penting untuk mengevaluasi beberapa aspek. Pertama, perlu ditinjau apakah kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya, juga harus diperiksa apakah ada evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mengatasi masalah banjir rob.	masalah yang masih belum teratasi dengan baik. Di antaranya adalah kapasitas saluran yang belum optimal dan upaya yang belum maksimal dalam menghentikan penurunan tanah.

Sumber: *Olahan Data Penulis, 2024*

Penelitian tentang evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara untuk tahun 2022-2023 memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ada kemiripan dalam fokus penelitian, yang meliputi upaya pemerintah menghadapi banjir rob dan penilaian ketangguhan Kota Semarang terhadap banjir rob, serta tindakan masyarakat Mangkang Wetan dan pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir rob. Namun, penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya, terutama dalam hal fokus. Penelitian sebelumnya hanya menilai upaya pemerintah dalam penanganan banjir rob, kesiapan masyarakat dan pemerintah,

serta kebijakan terkait subsidi tanah di Tambakrejo Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan menjadi referensi yang berguna untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kata 'kebijakan' sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat yang kini lebih memperhatikan tindakan pemerintah. Seringkali, kata 'kebijakan' disamakan dengan 'kebijaksanaan', padahal keduanya memiliki konotasi yang berbeda. 'Kebijaksanaan' berasal dari kata '*wisdom*' dan melibatkan pertimbangan mendalam serta pemikiran bijak, sedangkan 'kebijakan' berasal dari kata '*policy*' yang mencakup aturan-aturan dan sangat terkait dengan proses politik.

Carl J. Frederick, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dirumuskan oleh individu atau kelompok bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan

masalah, kebijakan publik ini tentunya dapat berubah-ubah sesuai dengan target dan hasil yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.

James E. Anderson, seperti yang dikutip oleh Subarsono (2012:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor eksternal di luar pemerintah. Sementara itu, Harrold Laswell dan Abraham Kaplan, menurut Nugroho (2013:3), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang dirancang dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu, karena itu kebijakan publik perlu sejalan dengan nilai-nilai serta praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, kebijakan tersebut kemungkinan akan menghadapi resistensi saat diimplementasikan.

Proses penyusunan kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati, diantaranya:

1. Penyusunan agenda

Pada tahap awal ini, setiap individu atau kelompok berdiskusi untuk menentukan topik atau permasalahan yang akan diselesaikan. Pada proses ini, dirumuskan agenda yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan. Pada titik ini, mungkin terdapat isu-isu yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sementara beberapa masalah lainnya menjadi pusat perhatian utama. Selain itu, beberapa masalah

mungkin ditunda penanganannya untuk waktu yang cukup lama karena alasan-alasan tertentu.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah atau isu yang telah diusulkan dan masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Isu-isu ini didefinisikan untuk mencari solusi terbaik. Solusi tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang tersedia. Dalam proses perumusan kebijakan, setiap alternatif dievaluasi untuk menentukan pilihan yang paling tepat dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan solusi terbaik.

3. Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan dianggap sebagai catatan yang tertata dengan baik jika tidak diterapkan, yaitu jika tidak dilaksanakan oleh lembaga administrasi atau agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diterapkan oleh unit-unit administratif yang menggerakkan sumber daya keuangan dan manusia. Selama tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling bertentangan. Beberapa kebijakan mungkin akan mendapatkan dukungan dari pelaksana, sementara yang lain mungkin akan mengalami penolakan dari mereka.

4. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai dampak yang diinginkan, yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, ditentukan ukuran atau kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam menilai apakah kebijakan publik yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau belum.

1.6.2 Teori Evaluasi Kebijakan

Dye dalam Parsons (2014) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses yang objektif, sistematis, dan berbasis data untuk menilai dampak dari program serta kebijakan publik terhadap sasaran yang telah ditentukan, berdasarkan pencapaian tujuan. Dengan kata lain, sebuah kebijakan atau program dianggap efektif jika dapat secara jelas mengatasi masalah-masalah yang ada. Evaluasi kebijakan ini memberikan umpan balik yang penting untuk kritik atau penjelasan mengenai manfaat dari pemilihan target atau tujuan tersebut.

Menurut Dunn, W. N. (2003), evaluasi kebijakan adalah metode untuk menilai evaluasi kebijakan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi mencakup penilaian dan perbandingan antara hasil implementasi kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara sistematis, penilaian ini akan dikritik berdasarkan kelayakan target dan tujuan yang berkaitan

dengan masalah yang ditangani. Selain itu, evaluasi kebijakan juga dapat melibatkan pengujian berbagai alternatif nilai dan rasionalitas mereka dalam berbagai bentuk.

Evaluasi terkait dengan pengelolaan informasi mengenai manfaat atau nilai dari kinerja kebijakan. Hasil kebijakan dianggap bernilai jika berkontribusi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara dasar, evaluasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Fungsi utama evaluasi kebijakan adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut pantas diterapkan atau tidak.

Berdasarkan berbagai definisi evaluasi kebijakan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses dalam kebijakan publik yang mencakup penyampaian informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil atau target kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai dan kebutuhan yang diperoleh melalui tindakan publik sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Solichin Abdul Wahad (2002), evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang yang diharapkan telah tercapai melalui tindakan publik. Evaluasi ini mengukur pencapaian tujuan dan target tertentu.
2. Evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memperjelas nilai-nilai tersebut dengan mendefinisikan serta mengoperasikan tujuan dan target yang ditetapkan.

3. Evaluasi mendukung penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam merumuskan masalah dan memberikan rekomendasi. Informasi mengenai kekurangan dalam kinerja kebijakan dapat membantu dalam merumuskan ulang masalah kebijakan yang ada.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan. Keberhasilan kebijakan dapat diukur dari dampak atau hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut.

Menurut William Dunn, dalam Pambudi dan Sunarharum (2023), evaluasi kebijakan adalah proses yang menentukan arah perbaikan dari kebijakan yang ada, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas: mengukur sejauh mana tujuan-tujuan dicapai dengan tepat dan apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi: menilai usaha pencapaian hasil secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang ada secara efektif.
3. Kecukupan: menilai pelaksanaan kebijakan dalam program dan peraturan yang ditetapkan, serta kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
4. Perataan: mengevaluasi pencapaian hasil kebijakan secara menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan, berdasarkan tugas dan fungsinya.

5. Responsivitas: menilai kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan: menilai kepastian pelaksanaan kegiatan yang terarah untuk mencapai tugas dan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di masa depan agar lebih baik. Evaluasi lebih fokus pada perbaikan dan peningkatan kesempatan di masa depan daripada hanya menilai kesalahan di masa lalu, dengan tujuan utama untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu proses menurunkan adanya konsep penelitian yang ada menjadi beberapa bagian atau dimensi yang lebih rinci agar dapat dengan mudah dipahami dan diukur. (Nawar, 2015: 63). Suatu konsep terdiri atas variabel/indikator didalamnya. Dalam penelitian ini, terdapat konsep analisis evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan, biasanya dilakukan setelah kebijakan publik diimplementasikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menguji sejauh mana kebijakan berhasil atau gagal, serta menilai keefektifan dan efisiensinya. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menggunakan teori William

Dunn yang dikembangkan oleh Pambudi dan Sunarharum (2023) dengan konsep analisis evaluasi kebijakan terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Mendeskripsikan apakah kebijakan penanganan rob berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti pengurangan frekuensi dan dampak banjir rob.

- a. Tingkat keberhasilan penurunan banjir rob di daerah yang terdampak.
- b. Kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan rob.

2. Efisiensi

Mendeskripsikan sumber daya yang ada (baik manusia maupun sarana dan prasarana) digunakan secara optimal dalam penanganan rob.

- a. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan rencana.
- b. Efektivitas alokasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.

3. Kecukupan

Menganalisis kebijakan yang diterapkan cukup untuk mencapai tujuan, serta tingkat kerjasama antara instansi terkait.

- a. Adanya program atau kebijakan tambahan yang diperlukan.
- b. Tingkat kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

4. Pemerataan

Mendeskripsikan sejauh mana hasil dari kebijakan penanganan rob dirasakan secara merata oleh masyarakat.

- a. Pemerataan dampak positif dari kebijakan di seluruh wilayah terdampak.

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penanganan rob.

5. Responsivitas

Mendeskripsikan kemampuan pemerintah dalam mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat terkait penanganan rob.

a. Adanya program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

b. Tingkat respons dan adaptasi pemerintah terhadap situasi darurat banjir rob.

6. Ketepatan

Mendeskripsikan kepastian dan ketepatan pelaksanaan program penanganan rob sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan.

a. Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan program.

b. Tingkat pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan konsep dan indikator dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 dapat disimpulkan di tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Analisi	Teori	Konsep	Indikator
Evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023	Teori Evaluasi kebijakan	1. Efektivitas	a. Tingkat keberhasilan penurunan banjir rob di daerah yang terdampak. b. Kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan rob.
		2. Efisiensi	a. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan rencana.

Analisi	Teori	Konsep	Indikator
			b. Efektivitas alokasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
		3. Kecukupan	a. Adanya program atau kebijakan tambahan yang diperlukan. b. Tingkat kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
		4. Perataan	a. Pemerataan dampak positif dari kebijakan di seluruh wilayah terdampak. b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penanganan rob.
		5. Responsivitas	a. Adanya program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. b. Tingkat respons dan adaptasi pemerintah terhadap situasi darurat banjir rob.
		6. Ketepatan	a. Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan program. b. Tingkat pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian berkaitan dengan rencana atau metode yang akan diterapkan dalam penelitian (Abdussamad, 2021: 100). Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Murdiyanto (2020: 19), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman masalah dalam konteks kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata yang holistik, kompleks, dan rinci. Sementara itu, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis mengenai gejala, fakta, atau kejadian terkait dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu (Hardani, 2020: 54).

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023. Selain itu digunakannya metode serta jenis penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023. Pada penelitian ini, adapun tahap pelaksanaan penelitian yang akan dijalankan adalah sebagai berikut: (Abdussamad, 2021: 103).

a. Tahap Persiapan

Dalam penelitian, tahap persiapan menjadi tahap awal yang dilakukan sebelum penelitian. Pada bagian ini peneliti sebelumnya melakukan analisis melalui data sekunder terkait informasi pendukung yang nantinya menunjang peneliti melakukan penelitian. Dengan teknik pengumpulam data yang akan digunakan yaitu wawancara,

dokumentasi, dan kepustakaan, peneliti mempersiapkan pertanyaan dan alat penunjang yang dibutuhkan, seperti alat tulis dan alat perekam audio (*smartphone*).

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan menggali informasi lebih mendalam terhadap pihak atau sasaran yang terkait. Semua pertanyaan yang telah disusun sebelumnya pada tahap persiapan, disinilah peneliti melakukan tindakan berupa wawancara langsung terhadap informan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut. Dengan demikian, apabila seluruh data atau pertanyaan sudah lengkap terjawab, peneliti melakukan analisis data.

c. Tahap Pelaporan

Setelah dilakukannya tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan data kembali dari hasil wawancara yang kemudian telah dilakukan analisis data guna mendapatkan keabsahan data. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti berhak membuang atau membatalkan hasil data dari kegiatan wawancara yang dikira tidak masuk akal. Kemudian peneliti menyusun dan menyimpulkan dengan membuat diagram beserta penjelasan secara deskriptif, yang mana dari data ini yang nantinya menjawab pertanyaan dan fokus penelitian yang diharapkan. Laporan hasil penelitian yang diperoleh nantinya adalah bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan penelitian berupa pengumpulan data yang peneliti selesai jalankan.

(Abdussamad, 2021: 106).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dipilih adalah orang yang memiliki peran penting sebagai informan dalam memperoleh data secara detail dan akurat berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penulis memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Adapun informan yang ditentukan untuk mendukung pengambilan data yaitu:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
3. Masyarakat Semarang Utara.
4. Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintari Semarang.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, rumah terdampak Rob di Kota Semarang khususnya di daerah Semarang Utara, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Semarang. Subjek dan objek penelitian tersebut dipilih karena dapat menjawab permasalahan ROB yang terjadi di Kota Semarang, yaitu dengan melihat evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data penelitian kualitatif, di mana data diperoleh peneliti dari hasil pengumpulan dan penggalan beberapa informasi yang ada mengenai evaluasi kebijakan penanganan rob di

Semarang Utara tahun 2022-2023. Adapun proses pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan sumber data berupa :

a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang sumbernya langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini peneliti yang langsung bersumber dari informan yang didapat dari teknik pengumpulan data yang dilakukan. Biasanya data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan, sehingga hasil data nantinya langsung diperoleh peneliti saat penelitian dilakukan tanpa ada perantara.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder biasanya bersumber data dokumen, hasil penelitian terdahulu, atau karya tulis yang masih terkait dengan penelitian yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa jurnal-jurnal penelitian yang masih terkait dengan pembangunan mal pelayanan publik Kabupaten Rembang, lalu dokumen atau laporan, serta artikel atau data yang diunggah di situs atau *website* di Internet.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dengan tiga metode untuk dijadikan panduan pengumpulan data. (Abdussamad, 2021: 112).

a. Wawancara.

Penelitian melalui wawancara dilakukan secara terbuka, dalam hal ini informan memiliki kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* bahwasannya penentuan informan ditentukan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Informan yang dipilih merupakan orang yang paham dengan penelitian yang dilakukan. (Abdussamad, 2021: 137). Dalam memperoleh data, peneliti terfokus pada informan yang ditentukan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dan Masyarakat terdampak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya. Dalam teknik ini, peneliti harus dapat memilah dari data-data yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang diangkat. Dalam teknik dokumentasi data diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan atau dokumen lainnya. Teknik yang digunakan melalui pengambilan berupa video ataupun foto, serta melalui data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan *website* dengan merangkum, mempelajari dan mencari berbagai macam teori-teori dan pustaka pendukung. Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen sebagaimana Murdiyanto (2020: 45) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, berpendapat bahwa analisis data kualitatif adalah proses yang mencakup bekerja dengan data, mengorganisirnya, mengelompokkan menjadi unit yang dapat dikelola, mensintesis informasi, mencari pola, mengidentifikasi hal-hal penting dan yang dipelajari, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam studi tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Huberman dan Miles sebagaimana Hardani (2020: 163) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* yang meliputi tiga hal yaitu:

a. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan pada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk menyederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer dari hasil observasi dan

wawancara, serta data sekunder dari hasil dokumentasi.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukannya tahap reduksi data, peneliti selanjutnya melakukan display data, yaitu menyajikan hasil data tersebut dalam bentuk diagram dan penjelasan singkat karena jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penyajian data yang dimaksud yaitu kumpulan informasi yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serat pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti agar data penelitian mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya untuk menyajikan data yang terkait dengan evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, yang mana biasanya disertai pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian yang terkait dengan evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023.

d. Uji Validitas Data

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan uji validitas data untuk mengukur apakah hasil dari penelitian yang dijalankan sudah akurat dari sudut pandang peneliti atau pembaca secara umum. Atau dengan kata lain membuktikan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat dua macam validitas yaitu sifatnya yang internal, yaitu mengenai akurasi penelitian dengan hasil yang didapatkan, dan eksternal yang berkenaan akurasi apakah hasil penelitian bisa diterapkan atau digeneralisasikan sehingga berlaku juga pada kasus-kasus lain di luar penelitian. Peneliti di sini melakukan kegiatan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data melalui proses pengecekan dan membandingkan dari data yang didapatkan melalui sumber lain di luar data tersebut.